

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. karena pembangunan di Daerah menjadi salah satu indikator demi terwujudnya pembangunan Nasional. Oleh karena itu Pemerintah Pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur Rumah Tangganya sendiri, hal tersebut sesuai dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Keuangan Tahun 2024 yang disusun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sehingga laporan keuangan yang di susun ini perlu adanya publikasi, hal itu bertujuan untuk transparansi publik, sebagai informasi kepada masyarakat, sebagai akuntabilitas publik, sehingga dapat memberikan informasi dalam pembuatan keputusan dalam hal ekonomi, sosial dan politik, serta dapat juga memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial SKPD.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, karena LRA dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 oleh SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai entitas akuntansi maupun oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku Entitas Akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. disamping itu Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Kuangan SKPD ini secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, untuk kepentingan :

- a) Akuntabilitas
Kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.
- b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c) Transparasi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah

- 2.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024
- 2.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2 Laporan Operasi (LO)
- 3.3 Neraca SKPD
- 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab IV Penjelasan Tambahan atas Informasi Non Keuangan

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

2.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.197.528.016.710 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).

2.2 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk menunjang pelayanan di Bidang Kesehatandapat kami jelaskan sebagai berikut bahwa sehungungan dengan adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 73 Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka telah terjadi perubahan Nomenklatur Dinas dari Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga berdampak pula pada Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran, didalam penyusunan laporan keuangan ini untuk alokasi anggaran digabungkan antara Dinkes Dukcapil dan Dinas Kesehatan (SPJ Fungsional) sebesar Rp. 197.528.016.710 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) sedangkan untuk realisasi anggaran di pisahkan dalam SPJ Fungsional, penggabungan realisasi anggaran dapat dilihat dalam Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dari tabel RLA realisasi Anggaran penggabungan sebesar Rp. 182.194.444.433,33 atau sebesar 92.24%

Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi NTT didukung dengan Lima Program Kegiatan, Empat Belas Kegiatan dan Tiga Puluh Tujuh Sub Kegiatan dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 197.528.016.710 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) realisasi anggaran sebesar dengan realisasi belanja sebesar RP. 164.617.772.249 atau sebesar 83,34% dengan rincian masing masing program sesuai SPJ Fungsional sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari Tujuh Kegiatan dengan Enam Belas Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.527.446.583 sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 23.396.863.660.83 atau sebesar 53,94%. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dapat dilihat di tabel dibawah ini :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37,527,446,583	23,396,863,660.83	62.35
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22,469,629,701	13,396,616,262	59.62
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,391,574,901	13,325,329,262	59.51
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78,054,800	71,287,000	91.33
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	353,637,300	143,048,000	40.45
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	353,637,300	143,048,000	40.45
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,083,907,745	731,437,301	67.48
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	544,897,845	484,983,138	89.00
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,059,000	18,138,500	72.38
	- Penyediaan Bahan/Material	198,425,900	135,203,808	68.14
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	68,400,000	33,370,165	48.79
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	247,125,000	59,741,690	24.17
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang	25,392,000	17,770,000	69.98
	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	25,392,000	17,770,000	69.98
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,013,525,377	5,562,504,109	61.71
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,050,557,321	634,802,509	60.43
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,962,968,056	4,927,701,600	61.88
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581,354,460	390,033,592	67.09
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379,326,150	207,379,092	54.67
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12,710,000	-	-
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170,947,310	168,383,500	98.50
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,371,000	14,271,000	77.68
1.7	Peningkatan Pelayanan BLUD	4,000,000,000	3,155,454,397	78.89
	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4,000,000,000	3,155,454,397	78.89

Dari table realisasi Anggran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dapat dijelaskan bahwa realisasi sebesar 62,35% ini dikarenakan realisasi anggaran untuk belanja penyediaan gaji dan tunjangan ASN lima bulan (Januari s/d Mei 2024) telah dibayar melalui Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan untuk belanja Peningkatan Pelayanan BLUD tidak dicatat sebagai realisasi Anggaran sehingga mempengaruhi besaran realisasi anggaran.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri Tiga Kegiatan dan Enam Belas Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 134.963.7543.68,- sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 127.978.655.144,- atau sebesar 94,82%. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk masing masing Kegiatan Program dan Sub Kegiatan Program dapat dilihat di tabel dibawah ini :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	134,963,754,368	127,978,655,144	94.82
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9,592,723,755	7,966,827,832	83.05
	- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1,275,838,004	908,610,599	71.22
	- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8,316,885,751	7,058,217,233	84.87
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	124,935,812,480	119,645,044,798	95.77
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	395,543,000	268,327,080	67.84
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,103,379,600	795,871,926	72.13
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan	1,100,868,000	904,562,684	82.17
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	558,625,000	400,298,741	71.66
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	70,000,000	68,290,000	97.56
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3,510,000	3,500,000	99.72
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	94,499,500	94,339,500	99.83
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4,198,167,076	4,090,330,442	97.43
	- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	111,919,076,000	108,495,909,300	96.94
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1,538,497,320	1,166,272,973	75.81
	- Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	953,958,900	880,457,990	92.30
	- Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2,531,579,284	2,080,653,422	82.19
	- Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	468,108,800	396,230,740	84.65
2.3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	435,218,133	366,782,514	84.28
	- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas	435,218,133	366,782,514	84.28

Dari tabel realisasi anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dapat dijelaskan bahwa realisasi sebesar 94,82% merupakan sisa anggaran dari kegiatan kegiatan program.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari Dua Kegiatan dan Tiga Sub Kegiatan dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 24.696.569.860 sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi Anggaran sebesar Rp. 13.025.804.565,- atau sebesar 52,75%, Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, untuk masing masing Kegiatan Program dan Sub Kegiatan Program dapat dilihat di tabel dibawah ini :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	24,696,569,860	13,025,804,565	52.74
3.1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	22,821,500,160	11,439,279,360	50.13
	- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22,821,500,160	11,439,279,360	50.13
3.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,875,069,700	1,586,525,205	84.61
	- Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,472,227,700	1,357,203,435	92.19
	- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	402,842,000	229,321,770	56.93

Dari tabel realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 52,74% ini dikarenakan realisasi anggaran untuk belanja Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Gaji Tenaga Kontrak) selama lima bulan (Januari s/d Mei 2024) telah dibayar melalui Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mempengaruhi besaran realisasi anggaran.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri dari Satu Kegiatan dan Satu Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 248.586.000 sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp 216.448.880 atau sebesar 87.07%. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk masing masing Program, Kegiatan Program dan Sub Kegiatan Program dapat dilihat di tabel dibawah ini :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	248,586,000	216,448,880	87.07
4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	248,586,000	216,448,880	87.07
	- Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	248,586,000	216,448,880	87.07

Dari tabel realisasi anggran Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dapat dijelaskan bahwa realisasi sebesar 87,07% merupakan sisa anggaran dari kegiatan program.

5. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil terdiri dari Satu Kegiatan dan Satu Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 91.659.899- sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau sebesar 0%. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk masing masing Program, Kegiatan Program dan Sub Kegiatan Program dapat dilihat di tabel dibawah ini :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	91,659,899	-	-
5.1	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	91,659,899	-	-
	- Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	91,659,899	-	-

Dari tabel realisasi Anggran Program Pencatatan Sipil dapat dijelaskan bahwa realisasi sebesar 0% oleh karena dalam penggabungan anggaran antara Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan maka realisasi anggarannya telah tercatat dalam LRA sebesar Rp. 91.659.899

2.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala dalam pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 tidak terserap dengan baik, ada pun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Perubahan Anggaran.
 - Adanya Perubahan SOTK Dinas Kesehatan sehingga sangat berpengaruh terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran
 - Adanya beberapa kali perubahan anggaran sehingga berpengaruh pada jadwal pelaksanaan anggaran maka dilakukan kembali reschedule/ penjadwalan ulang kegiatan kegiatan program sehingga berakibat pada penumpukan kegiatan dan permintaan anggaran di akhir tahun.
 - Pengeluaran belanja diprioritaskan untuk kegiatan kegiatan yang bersumber dana dari Dak, Dak Non Fisik dan Dau Speksifik Grand dan untuk kegiatan kegiatan yang bersumber dana dari PAD dibatasi
- 2. Kegiatan / Pelaksanaan Program
 - Dengan adanya beberapa kali perubahan anggaran maka masing – masing program diminta untuk melihat kembali, kegiatan – kegiatannya agar dapat menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang tersedia
 - Dengan adanya perubahan anggaran maka masing masing program terus berkoordinasi agar perubahan yang terjadi dapat ditindak lanjuti dengan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang memiliki / menyentuh kepentingan masyarakat.
 - Kegiatan program yang bersumber dari PAD seperti perjalanan dinas, kegiatan sosialisasi maupun pertemuan dibatasi untuk sementara waktu, sehingga sangat berpengaruh pada serapan/realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

A. Pendapatan –LRA

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai SKPD yang mengalokasikan Pendapatan Daerah.

Pendapatan 31 Des 2024	Pendapatan 31 Des 2023
Rp.9.038.092.535,-	Rp.9.585.414.490,-

Pendapatan Pajak/Retribusi/Lain-lain PAD yang sah (Sesuai PAD yang dikelola oleh SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, target pendapatan yang ditentukan dalam tahun 2024 sebesar Rp.8.589.092.500,- (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Dan realisasi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.038.092.535,-(Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) 105.23% dari target yang ditentukan,

No	Uraian (Jenis Retribusi dan Likasi Objek Distribusi)	Target	Realisasi	%
1	Kantor Dinas :	30,000,000	37,550,000	125.17
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30,000,000	37,550,000	125.17
2	UPTD Latnakes	2,589,092,500	2,439,700,000	94.23
	Retribusi Sewa Gedung Pelatihan	2,589,092,500	2,439,700,000	94.23
3	UPTD Laboratorium Kesehatan	1,970,000,000	1,031,901,425	52.38
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1,970,000,000	1,031,901,425	52.38
4	Rumah Sakit Jiwa Naimata	4,000,000,000	5,528,941,110	138.22
	Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSJ Naimata	4,000,000,000	5,528,941,110	138.22
	Jumlah	8,589,092,500	9,038,092,535	105.23

Terkait dengan realisasi pendapatan sesuai tabel tersebut diatas dapat dijelaskan ada kenaikan pendapatan di Rumah Sakit Jiwa Naimata sebesar Rp. 1,528,941,110.00,-dari target yang ditentukan, sedangkan untuk UPTD Latnakes hampir mencapai target yang ditentukan hal ini dikarenakan telah aktifnya kegiatan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Lantakes. Sedangkan untuk UPTD Laboratorium Kesehatan terjadi penurunan pendapatan dari target yang ditentukan, oleh karena keterlambatan pengadaan reagen, yang disebabkan perubahan Nomenklatur Dinas Kesehatan Provinsi NTT, sehingga pengadaan reagen baru dapat diproses

pada bulan Agustus, adanya peralatan laboratorium yang rusak yang belum diperbaiki sehingga pelayanan pemeriksaan sebagian tidak bisa dilayani.

Untuk penerimaan sewa rumah dinas terjadi juga penurunan penerimaan oleh karena target yang ditentukan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan objek rumah dinas yang ada, dimana dari sembilan unit yang ada, hanya dapat ditempati sebanyak lima unit , dan empat unit lainnya dalam kondisi rusak berat.

B. Belanja

Rencana Belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Belanja 31 Des 2024	Belanja 31 Des 2023
Rp.182.194.444.433,33,-	Rp.173.047.371.243,-

Realisasi belanja tahun anggaran 2024 dari alokasi dana sebesar Rp.197.528.016.710 terealisasi Rp.182.194.444.433,33 atau sebesar 92,24% dengan struktur anggaran belanja sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Belanja Operasi	194.392.650.560	179.210.437.943,33	92,24
	Belanja Pegawai	22.950.454.091	21.162.183.391	93,68
	Belanja Barang Jasa	171.802.195.659	158.048.148.354,33	91,99
II	Belanja Modal	3.135.366.150	2.984.112.688	95,18
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.556.256.250	2.879.072.688	112,63
	Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	105.000.000	104.590.000	99,61
	Belanja Modal Aset tetap lainnya.	474.109.900	450.000	0,09
Total		197.528.016.710	182.194.444.433,33	92,24

Berdasarkan paparan anggaran dan realisasi dalam table tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa hampir sebagian besar rincian rekening belanja terealisasi diatas 90%. Namun ada beberapa kode rekening belanja yang terealisasi dibawah 90% dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Belanja Operasi	194.392.650.560	179.210.437.943,33	92,24
	Belanja Pegawai	22.950.454.091	21.162.183.391	93,68
	Belanja Barang Jasa	171.802.195.659	158.048.148.354,33	91,99

➤ Belanja Pegawai.

- a. Belanja tunjangan jabatan PNS terealisasi hanya sebesar Rp.270.300.000,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.530.510.000,- atau sebesar 50,95% hal ini disebabkan karena kesalahan penganggaran dari awal perencanaan yang tidak menghitung secara detail data tunjangan fungsional ASN dan tunjangan fungsional umum.
- b. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN terealisasi hanya sebesar Rp.26.633.279,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.29.683.182,- atau sebesar 89,73% hal ini disebabkan karena perencanaan awal dalam menghitung anggaran sudah mengantisipasi terkait penambahan atau pengurangan pegawai.
- c. Belanja Iuran jaminan kematian kerja ASN terealisasi hanya sebesar Rp.79.840.706,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.88.990.272,- atau sebesar 89,72% hal ini disebabkan karena perencanaan awal dalam menghitung anggaran sudah mengantisipasi terkait penambahan atau pengurangan pegawai.
- d. Belanja Iuran peserta TAPERA terealisasi hanya sebesar Rp.0,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.57.084.540,- atau sebesar 0% hal ini disebabkan karena perencanaan awal dalam menghitung anggaran dengan tidak melihat peraturan yang berlaku bahwa tidak dilakukan pemotongan TAPERA lagi.
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN terealisasi hanya sebesar Rp.8.301.836,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.11.855.976,- atau sebesar 67,75% hal ini disebabkan karena perencanaan awal dalam menghitung anggaran dengan tidak melihat peraturan yang berlaku.
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN terealisasi hanya sebesar Rp.2.234.870.224,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.2.670.329.380,- atau sebesar 83,69% hal ini disebabkan karena realisasi belanja berdasarkan kinerja yang tidak bisa diprediksi.
- g. Belanja bagi ASN atas Insentif pemungutan retribusi daerah terealisasi hanya sebesar Rp.163.827.124,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.319.553.772,- atau sebesar 51,27% hal ini disebabkan karena pembayaran insentif ini dipengaruhi oleh realisasi penerimaan.

➤ Belanja barang dan jasa.

- a. Belanja barang habis pakai terealisasi hanya sebesar Rp.10.150.899.327,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.11.793.478.333,- atau sebesar 86,07% hal ini disebabkan karena pelaksanaan efisiensi biaya oleh instansi.

- b. Belanja obat-obatan lainnya terealisasi hanya sebesar Rp.92.108.600,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.174.439.542,- atau sebesar 52,80% hal ini disebabkan karena proses perencanaan anggaran diantisipasi dengan motif berjaga-jaga serta realisasinya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Belanja honorarium narasumber/pembahas moderator pembawa acara dan panitia terealisasi hanya sebesar Rp.152.900.000,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.262.650.000,- atau sebesar 58,21% hal ini disebabkan karena pembayaran honor disesuaikan berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa pembayaran honor ASN hanya 50%.
- d. Belanja jasa pelayanan umum terealisasi hanya sebesar Rp.23.404.968.000,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.29.363.069.560,- atau sebesar 79,71% hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kontrak yang keluar karena lolos penerimaan PPPK dan ASN.
- e. Belanja jasa pengolahan sampah terealisasi hanya sebesar Rp.19.733.750,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.33.560.000,- atau sebesar 58,60% hal ini disebabkan karena menyesuaikan dengan tagihan pemusnahan sampah oleh dinas DLHK.
- f. Belanja paket pengiriman terealisasi hanya sebesar Rp.754.263.513,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.1.068.373.699,- atau sebesar 70,60% hal ini disebabkan karena realisasi berdasarkan volume tagihan pengiriman dari kantor POS.
- g. Belanja sewa tanah bangunan, gedung tempat tinggal terealisasi hanya sebesar Rp.0,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.13.830.000,- atau sebesar 0% hal ini disebabkan karena tidak dilakukan sewa gedung kepada tenaga kesehatan (dokter spesialis RSJ).

2. Belanja Modal terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
II	Belanja Modal	3.135.366.150	2.984.112.688	95,18
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.556.256.250	2.879.072.688	112,63
	Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	105.000.000	104.590.000	99,61
	Belanja Modal Aset tetap lainnya.	474.109.900	450.000	0,09

Sebagian besar rekening belanja modal terealisasi diatas 90% namun hanya pada belanja modal alat musik saja yang tidak terealisasi karena terhambatnya/gagal proses pengadaan.

C. Surplus/defisit LRA

Surplus/defisit LRA Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebesar Rp.(173,156,351,898.33) yang diperoleh dari pengurangan pendapatan daerah sebesar Rp.9,038,092,535.00,- dikurangi total realisasi belanja sebesar Rp.182.194.444.433,33,-.

3.2. Laporan Operasional (LO)

A. Pendapatan LO

Pendapatan LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 144.745.222.249,- terdiri dari :

- Pendapatan retribusi daerah Rp. 3.509.151.425,- yang terdiri dari Pendapatan Retribusi Pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.3.509.151.425,- retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 37.550.000,- retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp. 1.031.901.425,- retribusi pemakaian ruangan sebesar Rp. 2.439.700.000,-
- Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp.5.528.941.110,- yang merupakan pendapatan hibah dari jasa layanan BLUD RSKD Jiwa Naimata sebesar Rp.5.528.941.110,- dan pendapatan hibah obat obatan dan Alkes APBN dari pemerintah pusat senilai Rp. 135.707.129.714,- .

B. Beban- LO

Beban LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp369.495.748.590,12,- yang terdiri dari beban operasi dan beban penyusutan/amortisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Operasi meliputi :

a. Beban Pegawai tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.21.100.303.391,- yang terdiri dari :

- Beban gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.16.896.605.528
- Beban tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.3.908.180.739,-
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar Rp.253.997.124,-
- Beban pegawai BLUD tereliris sebesar Rp.41.520.000,-

b. Beban barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp. 333,832,446,276.43,- yang terdiri dari :

- Beban barang senilai Rp. 186.351.516.535,42,- serta
- Beban jasa sebesar Rp.140.216.868.288,-
- Beban pemeliharaan sebesar Rp.992.183.070,01,-
- Beban perjalanan dinas sebesar Rp.6.263.683.383,-
- Beban uang dan/ jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-LO sebesar Rp.8.195.000,-

2. Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2024 terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 12.634.582.343.79,- beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.1.710.448.846,83,- beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.131.785.732,07,- beban amortisasi asset tidak berwujud sebesar Rp.86.182.000,-

C. SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/defisit – LO Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebesar Rp (224,750,526,341.12) yang diperoleh dari pengurangan pendapatan daerah-LO sebesar Rp.144,745,222,249,- dikurangi total realisasi beban - LO sebesar Rp 369,495,748,590.12,-.

3.3. Neraca SKPD

3.3.1. Aset :

1. Aset Lancar :

a. Kas di BLUD:

Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan eksternal oleh BPK terdapat Saldo kas Tunai pada bendaharawan BLUD RSKD Jiwa Naimata per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 818. 600, yang merupakan sisa kas dana BLUD yang belum sempat di setor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan sudah dilakukan penyeterak ke Kas Daerah pada tanggal 20 Maret 2025

b. Persediaan Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.119.144.569.274,96,- terdiri dari :

- Persediaan bahan penunjang Laboratorium sebesar Rp.635.002.683,56,- dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp.600.481.629,45 mengalami kenaikan sebesar Rp.34.521.054,11. Mutasi terjadi akibat pembelian/pengadaan di tahun 2024 sebesar Rp.169.801.562,44,- , Pemakaian bahan penunjang atau koreksi kurang sebesar Rp.135.280.508,33,-.
- Persediaan bahan habis pakai reagenesia sebesar Rp.997.493.518,01,- dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp.637.508.703,84 mengalami kenaikan sebesar Rp. 359.984.814,17. Mutasi terjadi akibat pembelian/pengadaan di tahun 2024 sebesar Rp.979.080.848,08,- , Pemakaian bahan habis pakai reagenesia atau koreksi kurang sebesar Rp.619.096.033,91,-.
- Persediaan bahan habis pakai dan alat kesehatan sebesar Rp.439.561.514,13,- dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.021.203.614,63 mengalami penurunan sebesar Rp. (581.642.100,50,-) Mutasi terjadi akibat pembelian/pengadaan di tahun 2024 sebesar Rp.193.815.168,- , Pemakaian bahan habis pakai dan alat kesehatan atau koreksi kurang sebesar Rp.775.457.268,5,-.
- Persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp.117.072.511.559,26,- dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya sebesar Rp.156.962.543.535,14 mengalami penurunan sebesar Rp. (39.890.031.975,88,-) Mutasi terjadi akibat pembelian/pengadaan di tahun 2024 sebesar Rp.136.597.252.171,86,-, Pemakaian bahan obat-obatan atau koreksi kurang sebesar Rp.176.487.284.147,74,-.

3. Aset Tetap

Nilai buku Aset tetap kondisi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.161.062.699.109,97,- merupakan nilai asset tetap perolehan setelah dikurangi nilai akumulasi penyusutan. Sedangkan nilai buku asset tetap tahun 2023 sebesar Rp. 163.765.674.674,98,- mengalami penurunan sebesar Rp.(2.702.975.565,01,-) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Aset tetap tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.75.416.678.156,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 75.416.678.156,- tidak mengalami perubahan.
- b. Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 148.542.626.206,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.145.663.843.117,- bertambah sebesar Rp.2.878.783.089,- dengan nilai buku aset sebesar Rp. 75.416.678.156,- Dengan perincian sebagai berikut:

Saldo Awal Tahun 2023	: Rp.	145.663.843.117,-
Belanja Modal Dinas Tahun 2024	: Rp.	1.930.420.313,-
Belanja Modal BLUD Tahun 2024	: Rp.	948.652.375,-
Koreksi Bertambah (Reklas Barjas)	: Rp.	4.200.000,-
Koreksi Tambah reklas antar KIB	: Rp.	29.970.000,-
Koreksi Kurang Mutasi antar KIB	: Rp.	(6.750.000),-
Koreksi kurang Aset bawah Kapitalisasi:	Rp.	27.709.599,-
Akumulasi Penyusutan	: Rp.	(137.906.178.188,91),-
Saldo nilai Buku tahun 2024	: Rp.	75.416.678.156,-

- c. Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.84.583.429.161,85,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.84.054.473.347,85,- bertambah sebesar Rp.528.955.814,- dengan nilai buku aset sebesar Rp. 68.301.470.687,36,- dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Tahun 2024	: Rp.	84.054.473.347,85,-
Belanja Modal Dinas Tahun 2024	: Rp.	0,-
Belanja Modal BLUD Tahun 2024	: Rp.	0,-
Koreksi Bertambah (Reklas Barjas)	: Rp.	528.955.814,-
Akumulasi Penyusutan	: Rp.	(16.281.958.474,48),-
Saldo nilai Buku tahun 2024	: Rp.	68.301.470.687,36,-

- d. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.5.192.402.616,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.104.032.616,- bertambah sebesar Rp.88.3370.000,- dengan nilai buku sebesar Rp.4.370.721.821,52,- Dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Tahun 2024	: Rp	5.104.032.616,-
Belanja Modal Dinas Tahun 2024	: Rp.	104.590.000,-
Koreksi Bertambah (Reklas Barjas)	: Rp.	7.000.000,-
Koreksi Tambah reklas antar KIB	: Rp.	6.750.000,-
Koreksi kurang reklas antar KIB	: Rp.	29.970.000,-
Akumulasi Penyusutan	: Rp.	(821.680.794,48),-
Saldo nilai Buku tahun 2024	: Rp.	4.370.721.821,52,-

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.197.401.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.204.451.000,-mengalami penurunan sebesar Rp.(7.050.000,-) dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Tahun 2024	: Rp.	204.451.000,-
Belanja Modal BLUD Tahun 2024	: Rp.	450.000,-
Koreksi kurang reklas antar KIB	: Rp.	7.500.000,-
Akumulasi Penyusutan	: Rp.	(0),-
Saldo nilai Buku tahun 2024	: Rp.	197.401.000,-

f. Kontruksi dalam pekerjaan (KDP)

Aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.139.979.428,- tidak mengalami perubahan/mutasi dari tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 Rp.2.139.979.428,- nilai tersebut merupakan anggaran terhadap paket perencanaan konstruksi yang terealisasi.

g. Akumulasi penyusutan

- Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (137.904.678.188,92),-sedangkan nilai akumulasi penyusutan tahun 2023 adalah sebesar Rp.(125.294.238.490,-) mengalami mutasi sebesar Rp.(12.610.439.698,83,-) hal ini disebabkan karena adanya tambahan beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp.12.634.582.343,79,- serta adanya koreksi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp.(22.642.644,96,-) .
- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.(16.281.958.474,48),-sedangkan nilai akumulasi penyusutan tahun 2023 adalah sebesar Rp.(22.816.824.437,37,-) mengalami mutasi sebesar Rp.6.534.865.962,89,- hal ini disebabkan karena adanya tambahan beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp.1.710.448.846,83,- serta adanya koreksi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp.(8.245.314.809,72,-) .
- Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (821.680.794,48),-sedangkan nilai akumulasi penyusutan tahun 2023 adalah sebesar Rp.(689.895.062,41,-) mengalami mutasi sebesar

Rp.(131.785.732,07),- hal ini disebabkan karena adanya tambahan beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp.131.785.732,07,- .

- Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- sedangkan nilai akumulasi penyusutan tahun 2023 adalah sebesar Rp.16.825.000,- mengalami mutasi sebesar Rp.(16.825.000),- yang merupakan koreksi kurang akumulasi penyusutan karena adanya perubahan pergub yang baru.

h. Aset Tak Berwujud.

Aset Tak berwujud untuk kondisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 440.410.000,- sedangkan Aset tak berwujud kondisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 432.910.000,- Ada peningkatan sebesar Rp.7.500.000,- yang merupakan hasil reklasifikasi dari KIB E (Aset tetap lainnya).

i. Aset lain Rusak Berat

Aset rusak berat per 31 Desember 2024 dengan nilai perolehan asset sebesar Rp.4.935.993.185,20,- tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dengan nilai akumulasi penyusutan asset rusak berat sebesar Rp.(3.479.210.040),- Dengan nilai buku asset sebesar Rp.1.456.783.145,20,-

j. Aset untuk diserahkan (Hibah ke Kabupaten) :

Aset untuk diserahkan kondisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- Aset untuk diserahkan kondisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.532.100.000,- ada penurunan karena sudah dibuktikan dengan dokumen SK.Gubernur terkait penyerahan Mobil ambulance ke Kabupaten.

k. Aset lain lainnya

Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan eksternal oleh BPK atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan sesuai hasil konfirmasi dengan penyedia jasa penginapan di Provinsi NTT maka ditemukan biaya perjalanan dinas untuk penginapan tidak sesuai dengan Standart Biaya Umum (SBU) Pergub no : 30 tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024, sehingga ada kelebihan pembayaran biaya penginapan sebesar Rp. 1.690.000 untuk tiga orang yang melakukan perjalan Dinas. Atas temuan kelebihan pembayaran tersebut maka yang bersangkutan telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah per tanggal 9 Mei 2025, bukti sestoran terlampir

3.3.2 Hutang

Utang belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 0,- berbanding tahun 2023 sebesar Rp.61.880.000,- ini merupakan Hutang belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp.61.880.000,- yang merupakan Hutang insentif atas

penerimaan retribusi pemakaian kekayaan Daerah di UPT.Latnakes tahun 2024 telah terbayar sesuai SP2D No :4272/1.02.0.00.0.00.03/SP2D/LS/2024 tanggal 18 Desember 2024.

Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Jiwa Naimata Kupang pada tahun 2024 memiliki kewajiban pembayaran atas pengadaan obat-obatan psikiatri dan neurologi yang digunakan untuk pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan. Sehingga menimbulkan beban hutang yang belum terselesaikan di tahun Anggaran 2024, sebesar 345.103.529 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang tersebar di enam penyedia obat atau Pedagang Besar Farmasi.

Beban Hutang ini muncul akibat kebutuhan mendesak akan kebutuhan obat-obatan psikotropika dan neuroleptik untuk pasien, karena adanya penambahan pasien, dan perubahan pola terapi dan pola persepan dokter dimana sebelumnya didominasi oleh antipsikotik generasi ke-1 yang memiliki banyak efek samping, menjadi antipsikotik generasi ke-2 yang minim efek samping. Beban hutang atas pengadaan obat-obatan ini akan dibebankan melalui dana BLUD RSKD Naimata Kupang.

3.3.3 Piutang

Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Jiwa Naimata Kupang pada tahun 2024 memiliki Hak atas Klaim Pasien dengan Jaminan Kesehatan untuk pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan. Total Piutang Pasien dengan Jaminan Kesehatan (BPJS) mencapai Rp584,281,400.00 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim bulan November dan Desember 2024 diantaranya : November sebesar : Rp. 325,281,400,00, Desember sebesar : Rp. 258,986,800,00 atas piutang tersebut menjadi Pendapatan Asli BLUD RSKD Jiwa Naimata yang sahkan untuk dapat dipergunakan, bukti pembayaran piutang dari BPJS Kesehatan terlampir.

3.3.4 Ekuitas

Ekuitas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.283.329.267.886,80,- merupakan kekayaan bersih entitas yang terdiri dari saldo ekuitas tahun lalu sebesar Rp.329.043.966.303,24,- ditambahkan surplus defisit LO Rp.(224.149.897.057,62), diakumulasi dengan nilai RK.PPKD sebesar Rp.174.171.568.971,50 serta Nilai dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar tahun berjalan sebesar Rp.4.263.629.669,68,-.

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah dikurangi dengan kewajiban. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 283.329.267.886,80,- Dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.329.043.966.303,24
Surplus/Defisit LO	Rp.(224.750.526.341,12)
RK.PPKD	Rp. 174.772.198.225,00
Dampak perubahan Aset Tetap	Rp. 512.446.215,-
Dampak perubahan penyusutan	Rp. 8.283.282.454,68,-
Dampak perubahan atas Utang	Rp. 1.000,-
Dampak perubahan atas asset lain	Rp. (4.532.100.000),-
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.283.329.267.886,80

BAB IV

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS-INFORMASI NON KEUANGAN

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 73 Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah sehingga, dalam melaksanakan tugas maka Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : Perumusan Kebijakan Bidang Kesehatan, Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesehatan, Pelaksanaan administrasi di Bidang Kesehatan, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi, untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan maka tugas pokok Dinas Kesehatan dibagi dalam 1 (satu) Sekretariat, 4 (Lima) Bidang, dan 3 (tiga) UPT dan Kelompok Jababatan Fungsional dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum
- b. Bidang SDM Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
 - 2) Seksi Peningkatan Mutu Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan KB
 - 2) Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- f. UPTD yang terdiri dari :
 - 1).UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan
 - 2).UPTD Laboratorium Kesehatan
 - 3). UPTD RSKD Jiwa Naimata
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2 Dukungan SDM Aparatur

Dalam hal dukungan sumber daya aparatur, jumlah ASN pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT per 31 Desember 2024 sebanyak 220 (Dua Ratus Dua Puluh) orang dengan klasifikasi golongan pangkat sebagai berikut :

- 1) Golongan IV sebanyak 40 (Empat Puluh)orang Pegawai.
- 2) Golongan III sebanyak 167 (Seratus Enam Puluh) orang Pegawai.
- 3) Golongan II sebanyak 13 (Tiga Belas) orang Pegawai.
- 4) Tenaga kontrak di Dinas Kesehatan 131 orang terdiri dari tenaga umum :111 orang, tenaga teknis 20 orang.
- 5) Tenaga Kontrak UPT Latnakes 34 orang terdiri dari tenaga umum : 32 orang tenaga teknis 2 orang
- 6) Tenaga Kontrak UPT RSKD Naimata Tenaga 142 orang terdiri dari Tenaga umum :54 orang tenaga teknis : 88 orang.
- 7) Tenaga Kontrak UPT Labkes 38 orang terdiri tenaga umum : 14 orang, tenaga teknis 24 orang.

Ditinjau dari aspek beban kerja jumlah PNS dinilai sudah cukup dibanding dengan beban kerja yang ada, untuk meningkatkan kinerja maka perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan SDM, ketrampilan dalam penguasaan IT disamping itu perlu peningkatan kedisiplinan, dedikasi dan etos kerja sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

4.3 Temuan yang telah di tindaklanjuti

Berdasarkan Berita acara monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pertanggal 22 November 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Temuan BPK RI

Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2010 s/d 2024 per 22 November 2024 sebagai berikut : Jumlah temuan 93 yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 72 (77,41%) dan yang masih dalam proses sebanyak 21 Temuan atau sekitar (22,58%)

2) Temuan Kemetrian Dalam Negeri

Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kemetrian Dalam Negeri tahun 2010 s/d 2024 per 22 November 2024 sebagai berikut : Jumlah temuan 4 yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 3 temuan atau (75%) dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1 Temuan atau sekitar (25%)

3) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 s/d 2024 per 22 November 2024 sebagai berikut : Jumlah temuan yang di rekomendasikan sebanyak 302 yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 263 (87,08%) yang

masih dalam proses sebanyak 10 temuan atau (3.31%), yang belum di tindaklanjuti 29 temuan atau (9,60 %)

4.4 Setoran LS, UP, dan TUP

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 untuk dana UP dan TUP dan LS ada sisa anggaran yang telah disetor berupa :

- 1) Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Pagu dana sebesar Rp. 189.097.731.962.- dan mendapatkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.274.055.000.- siasa uang yang telah di setor ke Kas Daerah sebesar Rp. 279.903.958 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Pagu dana sebesar Rp. 180.653.662.659 dan mendapatkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 2.424.634.900 siasa uang yang telah di setor ke Kas Daerah sebesar Rp. 511.293.934 (Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), Setoran belanja langsung atas pembayaran gaji tenaga kontrak sebesar Rp. 16.632.000 (Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) telah di Setor ke Kas Daerah, Setoran LS atas pembayaran BPJS Kesehatan Sebesar Rp. 2.961.420.000 (Dua Miliyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) hal ini disebabkan oleh karena kesalahan dalam melakukan transfer ke rekening BPJS yang harusnya didahului dari perekaman nilai SP2D dalam aplikasi E-dabu sehingga bisa terkoneksi dengan rekening Bank

4.5. Laporan Kejadian Kebakaran

Kejadian Kebakaran Kantor Dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggra Timur yang beralamat di Jl. Palapa No 22 Oebobo Kupang NTT. Pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wita telah terjadi kebakaran pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang beralamat di Jl. Palapa No 22 Oeboo Kupang NTT, dan menurut kesaksian mata api berasal dari lantai dua bagian belakang kantor dan api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan pada lantai dua tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki luas bangunan 944 M² yang terdiri dari dua lantai. Adapun pada lantai dua Kantor Dinas Kesehatan tersebut terdapat ruangan-ruangan sebagai berikut : (1) Ruang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, (2) Ruang Sekretariat Kepala Dinas, (3) Ruang Podcast, (4) Ruang Aula, (5) Ruang Seksi Surveillance, (6) Ruang Seksi P2PTM, (7) Ruang Seksi PTM, (8) Ruang Kabid P2P, (9) Ruang GF Malaria, HIV,dan TB, (10) Ruang Kabid Kesmas, (10) Ruang Seksi Promekes, (11) Ruang Seksi Kesling, (12) Ruang Seksi Gizi-KIA, (13) Ruang sub Bagian Keuangan dan beberapa ruangan yang dijadikan tempat penyimpanan arsip dokumen pertanggungjawaban keuangan. Pada saat kebakaran terjadi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat langsung melapor kejadian kebakaran ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah NusaTenggara Timur, Resor Kota Kupang dengan nomor laporan STTL:L/GANGGUAN /B/52/IX/ 2024/ SPKT/ POLRESTA KUPANG KOTA / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, dan pada tanggal 28 September 2024, tim dari Kepolisian Resor Kota Kupang bersama Tim Laboratorium

Forensik Bali telah melakukan pengambilan sampel barang bukti sisa kebakaran untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Bali dan sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut. Adapun barang yang merupakan aset barang milik Negara yang rusak berat sebagai berikut :

Ruang : Kepala Dinas

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Meja kerja Pimpinan	1buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Meja Rapat	1buah	Rusak Berat	Terbakar
3	Meja Tamu	2buah	Rusak Berat	Terbakar
4	Kursi Vernekel	8buah	Rusak Berat	Terbakar
5	Kursi Kerja Pejabat	2buah	Rusak Berat	Terbakar
6	AC	2buah	Rusak Berat	Terbakar
7	Telephone	1buah	Rusak Berat	Terbakar
8	Kulkas	1buah	Rusak Berat	Terbakar
9	LemariKaca	1buah	Rusak Berat	Terbakar
10	TV39"	1buah	Rusak Berat	Terbakar
11	MejaTV	1buah	Rusak Berat	Terbakar
12	Meja Komputer	1buah	Rusak Berat	Terbakar
13	Kursi Sofa	2set	Rusak Berat	Terbakar
15	Diapenser	1 buah	Rusak Berat	Terbakar

A. Ruang :Aula Fatumnasi Lantai Dua

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Meja Rapat+Kaca	9buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Kain Meja+Kain Salempang	9buah	Rusak Berat	Terbakar
3	TV	1buah	Rusak Berat	Terbakar
4	Speaker	4buah	Rusak Berat	Terbakar
5	Mixer 8 ch	1buah	Rusak Berat	Terbakar
6	Mic Meja+1Receiver	4buah	Rusak Berat	Terbakar
7	Mic Lepas+1Receiver	2buah	Rusak Berat	Terbakar
8	Mic Kabel+1Kabel	1buah	Rusak Berat	Terbakar
9	PapanWhiteBoard	1buah	Rusak Berat	Terbakar
10	Layar	1buah	Rusak Berat	Terbakar
11	Kursi Pejabat	1buah	Rusak Berat	Terbakar
12	Kursi Rapat	37buah	Rusak Berat	Terbakar
13	LCD	1 buah	Rusak Berat	Terbakar
14	Tabung Pemadam	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
15	Kabel LCD	1 buah	Rusak Berat	Terbakar
16	AC + Remot	2 buah	Rusak Berat	Terbakar
17	Gorden	12 Buah	Rusak Berat	Terbakar
18	Kamera Sony Alpha 7III	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
19	Laptop Lenovo	1Buah	Rusak Berat	Terbakar

Ruangan Kepala Bidang Pencegahandan Pengendalian Penyakit

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Sofa	3 Buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Meja Tamu	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar

3	Lemari Kayu	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
4	Kursi Besi	4 Buah	Rusak Berat	Terbakar
5	Meja Biro Kaca	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
6	AC	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
7	Meja Kayu	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
8	Meja Makan	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
9	Kulkas kecil	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
10	Kursi Kayu	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
11	Printer Epson	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar

Ruangan : Sub Koordinator Surveilans Dan Imunisasi

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Ac ½Pk	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Lemari Kayu	4Unit	Rusak Berat	Terbakar
3	Lemari Rak	3 Buah	Rusak Berat	Terbakar
4	Kursi	17 Buah	Rusak Berat	Terbakar
5	Meja Kayu	13Buah	Rusak Berat	Terbakar
6	Telepon Interkom	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
7	LCD	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
8	PrinterEpson	7 Buah	Rusak Berat	Terbakar
9	Dispenser	1Unit	Rusak Berat	Terbakar
10	Vaksin Refrigerator	1Buah	Rusak Berat	Terbakar
11	Lampu	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
12	KitApd	12 Buah	Rusak Berat	Terbakar

Ruangan : Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

No	NamaBarang	Jumlah	Inventaris	Terbakar
1	Meja Kayu	9 Buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Kursi Kayu	12 Buah	Rusak Berat	Terbakar
3	Lemari Kayu Besar	2Unit	Rusak Berat	Terbakar
4	Lemari Kayu Kecil	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
5	Telepon Interkom	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
6	Body Fat AnalyzerOmron	3Buah	Rusak Berat	Terbakar
7	Timbangan Digital	5Buah	Rusak Berat	Terbakar
8	Tensimeter Digital Omron	3 Buah	Rusak Berat	Terbakar
9	Alat Periksa GulaDarah (AccuCheck)	5 Buah	Rusak Berat	Terbakar
10	Smoke Analyzer Merk Bedfont	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
11	Alat Periksa Gula Darah (AutoCheck)	6 Buah	Rusak Berat	Terbakar
12	Alat Ukur LingkarPerut	5 Buah	Rusak Berat	Terbakar
13	Mocrotoice	5 Buah	Rusak Berat	Terbakar

Ruangan : Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit Menular

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Meja Biro	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Meja ½ Biro	12 Buah	Rusak Berat	Terbakar

4	Kursi Kayu	7 Buah	Rusak Berat	Terbakar
6	LaptopAsus	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
7	LaptopDell	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
8	Printer Canon	3 Buah	Rusak Berat	Terbakar
9	Printer Epson	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
10	AC National	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
11	ACLG	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
12	Lemari Arsip	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
13	Lemari tembok untuk arsip	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
14	Kursi Busa Merah	6 Buah	Rusak Berat	Terbakar
15	Kursi Busa Biru	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
16	Kursi Busa Plastik	4 Buah	Rusak Berat	Terbakar
17	Kursi Biru (Roda)	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
18	Dispenser	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
19	Meja Dispenser	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
20	Telepon Interkom	4 Buah	Rusak Berat	Terbakar

Ruangan : Ruangan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Meja Biro	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Kursi Putar	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
3	Sofa	3 Buah	Rusak Berat	Terbakar
4	AC	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
5	Lemari Arsip	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar

Ruangan :Substansi Promosi Kesehatan

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Meja Biro	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Kursi Kayu	9 Buah	Rusak Berat	Terbakar
3	Meja1/2 Biro	13 Buah	Rusak Berat	Terbakar
4	Meja Komputer	3 Buah	Rusak Berat	Terbakar
5	KursiChitose	17 Buah	Rusak Berat	Terbakar
6	TV Tabung Merk Sharp	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
7	TV LED	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
8	AC	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
9	Lemari Arsip Kaca	4Buah	Rusak Berat	Terbakar
10	Lemari Kayu	2Unit	Rusak Berat	Terbakar
11	Lemari Arsip (Besi),berisi: - Laptop, LCD,Tripot	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
12	Kulkas1 pintu	3 Buah	Rusak Berat	Terbakar
13	Printer	3 Buah	Rusak Berat	Terbakar
14	Wireless	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
15	Layar LCD	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
16	Toa / Pengeras suara	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
17	Sofa	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar

Ruangan :Seksi Kesehatan Lingkungan danKesehatan Jasmani dan Olahraga

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Meja Kayu	12 Buah	Rusak Berat	Terbakar
2	Kursi Kayu	11Buah	Rusak Berat	Terbakar
3	Kursi Dudukan Warna Merah	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
4	Kursi Dudukan Warna Biru	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
5	Lemari Dinding Tanam	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
6	Lemari Kayu	2 Buah	Rusak Berat	Terbakar
7	AC	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
8	TV 43 Inchi+Standing	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar
9	Komputer/PC + Keyboard+CPU	1 Buah	Rusak Berat	Terbakar

Ruangan : Sub Bagian Keuangan

No	NamaBarang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Meja	22 Buah	Baik	Terbakar
2	Kursi	31 Buah	Baik	Terbakar
3	PC	3 Buah	Baik	Terbakar
4	Lemari	7 Buah	Baik	Terbakar
5	AC	4 Buah	Baik	Terbakar
6	Rak Besi	1 Buah	Baik	Terbakar

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kami.

Terima kasih.

Kupang, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

dr. Nen Adriany, M.Kes
Pembina Utama Muda
Nip. 197108182000032007